

PENGARUH UPAH MINIMUM DAN INVESTASI TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

I Gede Allen Sanjaya¹
Ida Ayu Nyoman Saskara²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
E-mail: allen050598@gmail.com

ABSTRAK

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan pembangunan yang diharapkan oleh setiap daerah, tidak terkecuali bagi kabupaten/kota Provinsi Bali. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk menganalisis pengaruh upah minimum dan investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. (2) Untuk menganalisis pengaruh upah minimum, investasi dan ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat. (3) Untuk menganalisis apakah upah minimum dan investasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui ketimpangan distribusi pendapatan. Data yang digunakan adalah data sekunder, dengan jumlah titik pengamatan 54 titik pengamatan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapat, sedangkan Investasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapat. (2) upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan tidak berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. (3) upah minimum (X_1) dan investasi (X_2) tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) melalui ketimpangan distribusi pendapatan (Y_1).

Kata kunci: upah, investasi, ketimpangan distribusi pendapatan, kesejahteraan masyarakat

ABSTRACT

Community welfare is one of the development goals expected by every region, not least for the regency/city of Bali Province. This study aims to (1) analyze the effect of the minimum wage and investment on the inequality of income distribution. (2) To analyze the effect of minimum wage, investment and income distribution inequality on people's welfare. (3) To analyze whether the minimum wage and investment have an indirect effect on people's welfare through inequality in income distribution. The data used is secondary data, with a total of 54 observation points. The analysis technique used is path analysis technique. The results show that (1) the minimum wage has a negative and significant effect on the inequality of income distribution, while investment has a positive but not significant effect on the inequality of income distribution. (2) the minimum wage has a positive and significant effect on people's welfare. investment has a positive and significant effect on the welfare of the community. Inequality of income distribution does not have a negative but not significant effect on people's welfare. (3) the minimum wage (X_1) and investment (X_2) do not indirectly affect the welfare of society (Y_2) through the inequality of income distribution (Y_1).

Keywords: wages, investment, inequality in income distribution, social welfare

PENDAHULUAN

Dua masalah besar yang pada umumnya dihadapi oleh negara yang sedang tahap berkembang seperti Indonesia adalah rendahnya pembangunan manusia yang mengarah kepada kesejahteraan serta kesenjangan ekonomi atau terjadinya ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah (Tambunan, 2001). Pembangunan memiliki tujuan untuk meningkatkan standar hidup (*level of living*) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Penciptaan berbagi kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (*selfesteem*) setiap orang melalui pembentukan sistem sosial, politik dan ekonomi serta meningkatkan kebebasan (*freedom*) setiap orang dalam memilih berbagi variabel pilihan yang ada (Citrawan dkk., 2018).

Indonesia merupakan negara yang berkembang dan masih banyak terjadi ketimpangan distribusi pendapatan di dalam masyarakat. Perbedaan potensi yang dimiliki setiap daerah mempengaruhi pendapatan yang dapat dihasilkan setiap daerah sehingga antara daerah satu dengan yang lain berbeda. Daerah yang memiliki sumber daya dan faktor produksi, terutama yang memiliki barang modal (*capital stock*) akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang memiliki sedikit sumber daya (Dwi Setyadhi Mustika, 2013). Posisi manusia selalu menjadi tema sentral dalam setiap program pencapaian pembangunan ekonomi. Tingkat pembangunan manusia dapat mempengaruhi

kemampuan penduduk dalam mengelola berbagai sumber daya untuk mencapai tingginya pembangunan manusia. Pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kualitas SDM, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pembangunan manusia (Oka dan Arka, 2015). Kuantitas tenaga kerja dalam kegiatan produksi dipengaruhi oleh adanya peningkatan investasi yang ditanamkan dalam suatu industri akibat adanya permintaan Taufik, dkk (2014). Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu merata terdapat daerah dengan pembangunan yang cepat dan daerah dengan pembangunan yang lambat, dimana ketidakmerataan pembangunan akan berpengaruh buruk terhadap kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah (Hariwan dan Swaningrum, 2015). Berikut ini merupakan tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Tabel 1.
Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2013-2019 (dalam poin)

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jembrana	68,67	69,66	70,38	70,72	71,65	72,36
Tabanan	72,68	73,54	74,19	74,86	75,45	76,17
Badung	77,98	78,86	79,80	80,54	80,87	81,60
Gianyar	74,29	75,03	75,70	76,09	76,61	77,36
Klungkung	68,30	68,98	69,31	70,13	70,90	71,73
Bangli	65,75	66,24	67,03	68,24	68,96	69,36
Karangasem	64,01	64,68	65,23	65,57	66,49	67,35
Buleleng	69,19	70,03	70,65	71,11	71,70	72,55
Denpasar	81,65	82,24	82,58	83,01	83,30	83,93

Sumber: BPS Statistik Bali, 2020

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa kabupaten/kota di Provinsi Bali merupakan suatu daerah yang berhasil melakukan peningkatan IPM. Meskipun

demikian rata-rata pertumbuhan IPM cenderung rendah atau masih di bawah angka 1 persen setiap tahunnya, maka dari itu pemerintah Provinsi Bali masih perlu melakukan pengembangan mutu modal manusia terutama dari segi pendidikan maupun tingkat upah yang ditetapkan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali agar rata-rata pertumbuhan IPM mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana Kota Denpasar menduduki peringkat tertinggi sementara Kabupaten Karangasem menduduki peringkat terendah dalam capaian mutu modal manusia Provinsi Bali. Hal tersebut menunjukkan bahwa kota Denpasar berhasil meningkatkan mutu modal manusia dengan baik dalam hal kesehatan, pendidikan maupun pendapatan masyarakat yang menjadi komponen Indeks Pembangunan Manusia.

Ketimpangan akan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu, daerahdaerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Selain memberikan dampak positif, terdapat pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah. Dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro dan Smith, 2004:235). Selain itu, ketimpangan antar wilayah akan mengakibatkan migrasi penduduk yang bekerja dan berpindahnya modal dari daerah yang tertinggal menuju daerah yang maju. Sudibia I Ketut et al, 2015.

Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah pengaruh upah minimum dan Investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan

kabupaten/kota di Provinsi Bali. Bagaimanakah pengaruh upah minimum, investasi dan ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Apakah upah minimum dan Investasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh Upah upah minimum dan Investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum, investasi dan ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Untuk menganalisis Apakah upah minimum dan Investasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Kegunaan Teoritis Penelitian ini merupakan wadah yang baik untuk mengaplikasikan teori-teori ekonomi mengenai indeks pembangunan manusia, distribusi pendapatan, UMK dan Investasi yang diperoleh selama menempuh kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi pustaka bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan indeks pembangunan manusia. Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah terutama pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan bidang pembangunan nasional khususnya mengenai peranan distribusi pendapatan dalam kaitannya dengan indeks pembangunan manusia, dalam hal ini sebaiknya yang dilakukan pemerintah adalah menciptakan

pertumbuhan ekonomi yang baik serta menentukan tingkat upah yang tidak jauh berbeda agar dapat mengurangi distribusi pendapatan di suatu daerah.

Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan (Arsyad 2016). Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari pasar. Keadaan pasar yang begitu kompetitif untuk mencari keuntungan, merupakan salah satu hal yang menjadi penghambat untuk menuju kesejahteraan. Kompetitif dalam pasar merupakan hal yang sangat wajar, karena persaingan menjadi sesuatu yang wajib dalam mekanisme pasar. Maka dari itu, perlu adanya kajian kesejahteraan ekonomi dalam membangun suatu kegiatan ekonomi yang dapat memberikan atau menciptakan suatu kondisi yang sejahtera dalam skala bermasyarakat ataupun lingkungan keluarga (Purbaya , 2016).

Indikator komposit pembangunan manusia adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat pencapaian pembangunan manusia antar wilayah dan antar waktu. IPM merupakan alat ukur yang dapat menunjukkan persentase pencapaian dalam pembangunan manusia dengan memperhatikan tiga faktor yaitu kelangsungan hidup, pengetahuan dan daya beli. Terdapat 3 golongan status pembangunan manusia berdasarkan nilai skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut:

- 1) $IPM < 50$ (rendah)
- 2) $50 \leq IPM < 80$ (sedang atau menengah)
- 3) $IPM \geq 80$ (tinggi)

Jika status IPM masih berada pada kriteria rendah maka menunjukkan bahwa daerah tersebut masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketinggalan kinerja pembangunan manusianya. Jika status IPM berada pada kriteria menengah maka pembangunan manusianya masih perlu ditingkatkan. Jika status IPM sudah berada pada kriteria tinggi maka kualitas pembangunan manusianya harus dipertahankan agar menjadi lebih baik. Indeks Pembangunan Manusia tidak hanya dikembangkan seterusnya saja akan tetapi juga harus menjalani pengukuran pencapaian dari keseluruhan baik daerah maupun negara (Anggatia Ariza, 2014). Terdapat tiga dimensi pembangunan, yaitu lama hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiganya diukur dengan menggunakan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan menurut teori Human Capital, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas, dimana modal manusia merupakan 19 faktor penting dan sebagian besar diabaikan dalam literatur ekonomi (Toth Russell, 2013) dan pengeluaran perkapita.

Teori ketimpangan distribusi pendapatan dapat dikatakan dimulai dari munculnya suatu hipotesa yang terkenal yaitu Hipotesis U terbalik (*inverted U curve*) oleh Simon Kuznets tahun 1955. Beliau berpendapat bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Ketimpangan distribusi pendapatan tidak terlepas atau sangat erat hubungannya dengan kemiskinan. Disparitas antara daerah dapat dilihat dari adanya perbedaan antar daerah ada daerah yang berhasil melakukan modernisasi dan industrialisasi, ada pula daerah yang terbelakang dan tradisional yang

bertumbuh pada pembangunan sektor pertanian dengan formasi kapital yang masih sangat rendah dan sederhana. Perbedaan tersebut jelas terlihat perbedaan antara kaya dan miskin. Ketimpangan dapat bertahan sampai daerah di Indonesia mencapai tingkat perkembangan tertentu, yang tampaknya tidak terjangkau bagi sebagian besar (Irawan Andi, 2015).

Kesenjangan Pendapatan merupakan ketimpangan relatif pendapatan antar golongan masyarakat yang diukur dengan gini ratio. Ada beberapa cara yang dijadikan sebagai indikator untuk mengukur pemerataan distribusi pendapatan, salah satunya adalah indeks gini atau rasio gini. Rasio gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal.

Data yang diperlukan dalam penghitungan gini ratio.

- 1) Jumlah rumah tangga atau penduduk
- 2) Rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumah tangga yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya.

Rumus untuk menghitung gini ratio:

$$G = 1 - \sum_{i=1}^{ki} \frac{P_i(Q_i+1Q_{i-1})}{10.000} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana:

Pi: persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i

Qi: persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i

Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika:

- $G < 0,3 \rightarrow$ ketimpangan rendah
- $0,3 \leq G \leq 0,5 \rightarrow$ ketimpangan sedang
- $G > 0,5 \rightarrow$ ketimpangan tinggi

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh didalam lingkungan usaha atau kerjanya. Batas standar upah minimum Kabupaten/Kota akan mempengaruhi jumlah orang untuk masuk kedalam pasar tenaga kerja. Penetapan upah minimum Kabupaten/Kota memiliki tujuan agar pekerja memperoleh penghasilan yang layak sebagai balas jasa tenaga kerja yang diberikan kepada pihak yang menggunakan (Borgan, 2018 dalam Samuelson, 2001). Tujuan dari ditetapkan upah minimum adalah untuk memenuhi standar hidup minimum sehingga dapat mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah (Sofiyana.2017).

Investasi atau Penanaman Modal merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk menambah modal serta memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Investasi yang terkonsentrasi hanya di beberapa daerah akan menjadi salah satu faktor penyebab adanya ketimpangan pendapatan. Hal ini dikarenakan, hanya daerah-daerah yang dinilai mendapatkan profit yang menjanjikan yang akan dilirik oleh para investor baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Investasi menurut Mankiw (2006) adalah komponen GDP (*Gross Domestic Product*) yang mengaitkan masa kini dan masa depan. Dalam teori Investasi Harrod-Domar, pembentukan modal/investasi merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal tersebut dapat diperoleh melalui akumulasi tabungan. Menurut Harrod-Domar, pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan

permintaan efektif masyarakat. Menurut teori Harrod-Domar, untuk meningkatkan laju perekonomian, maka diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok tambahan modal (Arsyad, 2015).

Secara teori ekonomi neoklasik berpendapat bahwa upah minimum akan meningkatkan kesenjangan pendapatan ketimbang menguranginya. Upah minimum menyebabkan, non pasar, berperan menentukan batas minimum upah di pasar tenaga kerja, yang meningkatkan harga tenaga kerja. Dengan meningkatnya harga tenaga kerja, upah minimum menghasilkan pengurangan permintaan tenaga kerja dan sebahagian pekerja akan menjadi pengangguran. Di sisi lain, institusional ekonom berpendapat bahwa upah minimum mengurangi ketimpangan. Upah minimum meredistribusi pendapatan dengan menurunkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan upah pekerja terendah (Levitan & Belous, 1979; Volscho, 2005). Dengan demikian, dengan menetapkan upah minimum maka standar upah akan lebih tinggi dan menciptakan distribusi upah dan pendapatan yang lebih adil (Bluestone & Harrison, 2001).

Berdasarkan teori Harrod-Domar yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif. Dengan terpusatnya investasi di suatu wilayah, maka ketimpangan distribusi investasi dianggap sebagai salah satu faktor utama yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi.

Harrod-Domar menjelaskan bahwa pembentukan modal/investasi merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Dalam teorinya, Harrod-Domar berpendapat investasi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka waktu yang lebih panjang. Dapat kita simpulkan, investasi akan berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung pada pertumbuhan ekonomi, kemudian dengan adanya peningkatan investasi maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat, seiring dengan peningkatan pertumbuhan tersebut maka akan berpengaruh pada ketimpangan pendapatan. Peningkatan atau penurunan investasi yang saling berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor pemicu ketimpangan pendapatan antar daerah.

Dalam teori pertumbuhan endogen, perkembangan teknologi merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap investasi. Menurut Todaro (2004), model pertumbuhan endogen dapat digunakan untuk mengetahui potensi keuntungan investasi yang tinggi di negara-negara berkembang yang rasio modal tenaga kerjanya masih rendah. Model pertumbuhan endogen melihat perubahan teknologi sebagai hasil endogen dari investasi dalam sumber daya manusia dan industri-industri padat teknologi, baik yang dilakukan pihak swasta maupun pemerintah. Teori ini mengacu pada inovasi atau perkembangan teknologi sebagai komponen yang berpengaruh terhadap investasi, dimana sebelumnya perubahan atau perkembangan teknologi merupakan hasil dari investasi modal fisik dan modal sumber daya manusia yang dapat menciptakan ekonomi eksternal dan peningkatan produktivitas.

Investasi merupakan faktor pendorong terhadap pendapatan negara ataupun daerah. Dengan adanya investasi dapat merangsang masyarakat untuk terus melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini dapat membantu masyarakat dari segi pemenuhan kebutuhan, karena investasi-investasi yang ada akan menciptakan barang modal baru sehingga akan menyerap produksi baru dan membutuhkan tenaga kerja. Terciptanya kesempatan kerja tentunya akan memberikan pendapatan pada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Novayanty et al (2017:81) dalam penelitiannya, adanya investasi-investasi baru memungkinkan terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan barang modal baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran.

Upah adalah pendapatan yang diterima tenaga kerja dalam bentuk uang yang mencakup upah atau gaji, dan tunjangan-tunjangan yang diterima secara rutin atau regular (tunjangan transport, uang makan dan tunjangan lainnya sejauh diterima dalam bentuk uang (Simpem dan Gede, 2012) Peningkatan upah minimum regional akan meningkatkan kebutuhan hidup layak sehingga standar hidup layak juga mengalami peningkatan yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan dan keperluan rumah tangga. Akibat peningkatan upah minimum yang diterima, daya beli masyarakat mengalami peningkatan sehingga berdampak positif pada *human development index* (Amirul Zamharir, 2016). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 8/1981

tentang Perlindungan Upah, yang dimaksud dengan upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dinyatakan nilai dalam bentuk uang yang ditetapkan dalam suatu persetujuan atau peraturan perundang undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh (Kurniawan dan Sulistyaningrum, 2017). Teori ekonomi memberikan prediksi yang saling bertentangan, bagaimanakah upah minimum wajib yang mempengaruhi pekerjaan termasuk retensi pekerjaan yang terkena dampak langsung oleh kenaikan upah minimum (Wildan Syafitri, 2013).

Menurut Todaro (2003:178) Distribusi pendapatan adalah penyebaran pendapatan atau perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat (Todaro, 2003:178). Maksudnya distribusi pendapatan merupakan perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat yang mengakibatkan adanya perbedaan pendapatan yang lebih besar antar lapisan dalam masyarakat sehingga kesejahteraan hanya dapat dirasakan oleh golongan tertentu saja.

Mengacu pada rumusan masalah dan landasan teori yang telah dijelaskan, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

- 1) Upah minimum dan investasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- 2) Upah minimum dan investasi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat sedangkan ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

3) Upah minimum dan investasi berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivis, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan (Sugiyono, 2017:23). Penelitian ini menggunakan variabel upah minimum, investasi, ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi nonparticipant, yaitu observasi yang dilakukan tanpa melibatkan diri dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2017: 232). Memperoleh data dengan metode ini dapat dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan serta mempelajari uraian-uraian dari buku-buku, jurnal-jurnal, situs internet, skripsi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti guna memperoleh dasar teoritis dan acuan untuk memperoleh data.

Titik pengamatan dalam penelitian ini ada di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam rentang waktu 2014 hingga 2019 (6 tahun) maka besarnya

ukuran sampel adalah $9 \times 6 = 54$ pengamatan dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*.

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah perhitungan minimum, maximum, mean dan standar deviasi (Sugyiono, 2017: 232).

Analisis jalur (*path analysis*) merupakan perluasan penerapan analisis regresi linier berganda untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel (model kasual) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Model ini dipertimbangkan untuk digunakan dalam suatu penelitian apabila hubungan yang dianalisis merupakan hubungan sebab akibat dengan model yang kompleks, dalam analisis jalur terdapat suatu variabel yang berperan ganda yaitu sebagai variabel independen pada suatu hubungan, namun menjadi variabel mediasi atau *intervening*. Adanya hubungan yang kompleks tersebut membutuhkan alat analisis jalur akan dapat dihitung pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel (Utama, 2016: 159).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan

yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugyiono, 2017: 232). hasil statistik deskriptif dalam penelitian dapat dilihat pada table 2 berikut.

Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif Upah Minimum, Investasi, Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Upah Minimum	54	1.542.600	2.700.297	1.986.731,30	310.288,469
Investasi	54	3.124	15.728.798	1.865.133,26	2.972.810,011
Gini Rasio	54	0,25	0,40	0,3335	0,03286
Indeks Pembangunan Manusia	54	64,01	83,93	73,0604	5,53267
Valid N (listwise)	54				

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa variabel Upah Minimum (X_1) memiliki nilai minimum sebesar 1.542.600 rupiah dan nilai maximum sebesar 2.700.297 rupiah dengan rata-rata 1.986.731,30 rupiah dan standar deviasi sebesar 310.288,469 rupiah. variabel investasi (X_2) memiliki nilai minimum sebesar 3.124 juta rupiah dan nilai maximum sebesar 15.728.798 juta rupiah dengan rata-rata 1.865.133,26 juta rupiah dan standar deviasi sebesar 2.972.810,011 juta rupiah. Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Y_1) memiliki nilai minimum sebesar 0,25 poin dan nilai maximum sebesar 0,40 poin dengan rata-rata 0,3335 poin dan standar deviasi sebesar 0,03286 poin. variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y_2) memiliki nilai minimum sebesar 64,01 poin dan nilai maximum sebesar 83,93 poin dengan rata-rata 73,0604 poin dan standar deviasi sebesar 5,53267 poin.

Pengaruh Upah Minimum dan Investasi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

- 1) Persamaan regresi sub struktural I:

Pengujian hubungan substruktural I dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung variabel minimum dan investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil persamaan regresi ditunjukkan sebagai berikut.

$$Y_1 = -0,504X_1 + 0,187X_2 + e_1$$

$$S_b = (0,000) \quad (0,000) \quad R^2 = 0,262$$

$$t = (-4,145) \quad (1,537) \quad F = 9,047$$

$$\text{sig} = (0,000) \quad (0,130)$$

$$F_{\text{tabel}} = (k-1) (n-k)$$

Keterangan:

k = Jumlah variabel bebas

n = jumlah sampel penelitian

$$F_{\text{tabel}} = (k-1) (n-k)$$

$$F_{\text{tabel}} = (2-1) (54-2)$$

$$F_{\text{tabel}} = (1) (52)$$

$$F_{\text{tabel}} = 4,03$$

2) Pengujian signifikansi persamaan regresi substruktural I

Tabel 3 Ringkasan Koefisien Jalur Substruktural I

Regresi	Koef. Reg Standar	t hitung	P. Value/ sig.	Keterangan
$X_1 \rightarrow Y_1$	-0,504	-4,145	0,000	Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_1$	0,187	1,537	0,130	Tidak Signifikan

Keterangan:

X_1 = Upah minimum

X_2 = investasi

Y_1 = ketimpangan distribusi pendapatan

Berdasarkan persamaan regresi struktural I, F_{hitung} menunjukkan angka sebesar 9,100 dengan F_{tabel} sebesar 4,03. $F_{hitung} 9,047 > F_{tabel} 4,03$, artinya bahwa model regresi yang diestimasi dari variabel upah minimum, investasi dan ketimpangan distribusi pendapatan sudah layak (*fit*).

Pengaruh Upah Minimum, Investasi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

1) Persamaan regresi substruktural II

Pengujian hubungan substruktural II dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung variabel Upah Minimum, Investasi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Hasil persamaan regresi ditunjukkan sebagai berikut.

$$Y_2 = 0,404X_1 + 0,376X_2 + 0,037Y_1 + e_2$$

$$S_b = (0,000) \quad (0,000) \quad (22,250) \quad R^2 = 0,338$$

$$t = (3,007) \quad (3,160) \quad (0,279) \quad F = 8,508$$

$$\text{sig} = (0,004) \quad (0,003) \quad (0,781)$$

$$F_{tabel} = (k-1) (n-k)$$

Keterangan:

k = Jumlah variabel bebas

n = jumlah sampel penelitian

$$F_{tabel} = (k-1) (n-k)$$

$$F_{tabel} = (2-1) (54-2)$$

$$F_{tabel} = (1) (52)$$

$$F_{\text{tabel}} = 4,03$$

2) Pengujian signifikansi persamaan regresi substruktural II

Tabel 4 Ringkasan Koefisien Jalur Substruktural II

Regresi	Koef. Reg. Standar	t hitung	P. Value/sig	Keterangan
X ₁ → Y ₂	0,404	3,007	0,004	Signifikan
X ₂ → Y ₂	0,376	3,160	0,003	Signifikan
Y ₁ → Y ₂	0,037	0,279	0,781	Tidak Signifikan

Keterangan:

X₁ = Upah Minimum

X₂ = investasi

Y₁ = ketimpangan distribusi pendapatan

Y₂ = kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan persamaan regresi struktural II, F_{hitung} menunjukkan angka sebesar 6,919 dengan F_{tabel} sebesar 4,03. $F_{\text{hitung}} 8,508 > F_{\text{tabel}} 4,03$, artinya bahwa model regresi yang diestimasi dari variabel Upah Minimum investasi ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sudah layak (*fit*).

Nilai kekeliruan Taksiran Standar (*Standard Error of Estimate*)

Mengetahu nilai e_1 yang menunjukkan jumlah variance variabel ketimpangan distribusi pendapatan yang tidak dijelaskan oleh Upah Minimum dan investasidihitung menggunakan rumus:

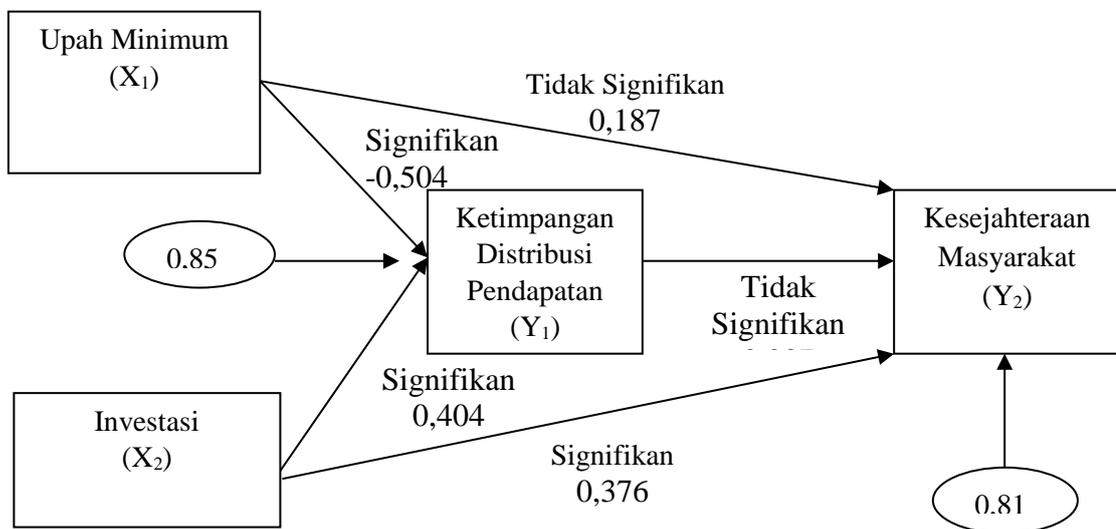
$$e_1 = \sqrt{(1 - R^2)}$$

$$e_1 = \sqrt{(1 - 0,262)} = 0,859$$

Sedangkan untuk mengetahui nilai e_2 yang menunjukkan variance variabel kesejahteraan masyarakat yang dijelaskan oleh variabel Upah Minimum, investasi dan ketimpangan distribusi pendapatan dihitung menggunakan rumus:

$$e_2 = \sqrt{(1 - R^2)}$$

$$e_2 = \sqrt{(1 - 0,338)} = 0,813$$



Gambar 1 Koefisien Jalur Hubungan Antar Variabel

Nilai Koefisien Determinasi Total

Memeriksa validitas model, terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan yaitu koefisien determinasi total hasilnya sebagai berikut:

$$R^2_m = 1 - (e_1)^2 - (e_2)^2$$

$$R^2_m = 1 - (0,859)^2 - (0,813)^2$$

$$R^2_m = 1 - (0,737) - (0,660)$$

$$R^2_m = 1 - (0,486)$$

$$R^2_m = 0,514$$

Keterangan:

R^2_m : koefisien determinasi

e_1, e_2 : nilai kekeliruan taksiran standar

Berdasarkan hasil hitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model sebesar 0,514 persen atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 51,4 persen dapat dijelaskan oleh model, sedangkan 48,6 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Pengaruh Langsung

1) Pengaruh upah minimum (X_1) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Y_1) kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Nilai *standardized coefficients Beta* sebesar -0,504 dengan sig $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapat kabupaten/kota di Provinsi Bali

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Musfidar (2012) yang menyatakan bahwa ada hubungan negatif dan signifikan antara variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nangarumba (2015) menyatakan UMP berpengaruh negatif signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan. Hal ini dikarenakan program pemerintah yang memang

sengaja menetapkan tingkat upah yang tidak jauh berbeda agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan di daerah-daerah, program ini akan mengurangi ketimpangan pengasilan pekerja yang tentunya juga akan mengurangi angka ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat. Upah merupakan penghasilan dari pekerja yang merupakan bagian dari pendapatan rumah tangga dan memiliki kontribusi utama dalam mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga, yang selanjutnya akan mengurangi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.

2) Pengaruh Investasi (X_2) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Nilai *standardized coefficients Beta* sebesar 0,187 dengan sig 0,130 > 0,05 maka H_0 diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nunnenkam (2011) yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif dalam jangka waktu pendek dan berpengaruh negatif dalam jangka waktu panjang terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Artinya pada saat penanaman modal asing meningkat (jangka pendek) maka ketimpangan distribusi akan meningkat, itu dikarenakan dalam jangka pendek (pengalaman eropa) mengarah pada kesimpulan bahwa penanaman modal asing umumnya memperdalam kesenjangan antar segmen kaya dan miskin, dan dalam jangka panjang penanaman modal asing akan relatif sedikit mengakibatkan resiko konflik sosial dan itu akan mengurangi ketimpangan pendapatan. Tingginya kegiatan investasi di daerah A dan rendahnya investasi di daerah B maka daerah A akan jauh

lebih cepat berkembang dibandingkan dengan daerah B. Oleh karena itu, hal ini akan mendorong tingginya ketimpangan pendapatan antara daerah A dan daerah B. Apabila peningkatan investasi, namun ketimpangan pendapatan malah mengalami penurunan. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa peningkatan investasi pada suatu daerah tanpa diikuti oleh peningkatan investasi di daerah lainnya, akan meningkatkan ketimpangan pendapatan (Barro, 2000).

3) Pengaruh upah minimum (X_1) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Nilai *standardized coefficients Beta* sebesar 0,404 dengan sig $0,004 < 0,05$ maka H_0 ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Upah Minimum berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Hubungan positif dan signifikan antara variabel upah minimum terhadap *human development index* sesuai dengan penelitian Amirul Zamharir (2016). Peningkatan upah minimum di 12 provinsi Indonesia dengan dikategori *lower medium* akan meningkatkan kebutuhan hidup layak sehingga standar hidup layak juga mengalami peningkatan. Upah (*wage*) adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pemerintah telah terlibat dalam menangani masalah pengupahan melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Permasalahan kesejahteraan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah dari sisi pendapatan atau upah. Seperti yang disampaikan Keynes (1883-1946) bahwa kalau tingkat upah diturunkan maka tingkat pendapatan masyarakat

akan turun (Todaro, 1999). Turunnya pendapatan sebagian anggota masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan akan berkurang. Pendapatan atau upah diperoleh dari hasil bekerja. Orang yang tidak bekerja atau pengangguran tidak mempunyai pendapatan. Hal ini akan berdampak terhadap daya beli, konsumsi dan tingkat kesejahteraannya yang rendah.

4) Pengaruh investasi (X_2) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Nilai *standardized coefficients Beta* sebesar 0,376 dengan sig $0,003 < 0,05$ maka H_0 ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Dalam teori Investasi Harrod-Domar, pembentukan modal atau investasi merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal tersebut dapat diperoleh melalui akumulasi tabungan. Menurut Harrod-Domar, pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Pada kegiatan investasi terdapat hubungan yang erat terhadap penciptaan lapangan pekerjaan baru, karena akan memunculkan kegiatan produksi yang meningkat sehingga masyarakat yang terserap akan memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Wihardjo (2014) menyatakan ada hubungan positif antara investasi atau penanaman modal asing dengan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Penelitian lain oleh Suciati, dkk. (2015) menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali pada tahun 2007 – 2012, investasi yang dilakukan pemerintah melalui belanja langsung telah dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketersediaan infrastruktur pada suatu daerah sangat penting, untuk dapat menarik investor melakukan investasi pada daerah tersebut sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sukirno (2012:423) menyatakan pertumbuhan ekonomimenerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan sesuatu ekonomi. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal.

5) Pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan (Y_1) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Nilai *standardized coefficients Beta* sebesar 0,037 dengan sig 0,781 > 0,05 maka H_0 diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yg dilakukan oleh Tunas (2017) yang

menyatakan ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh Unsur-unsur IPM yang ada belum secara merata menjangkau masyarakat. Karena Unsur-Unsur IPM yang ada hanya berkembang pesat pada daerah yang ada di sekitar kota, Sedangkan daerah yang jauh dari perkotaan sulit untuk memperoleh fasilitas seperti kesehatan, pendidikan yang layak. ketimpangan dalam distribusi pendapatan pada tahap awal cenderung semakin meningkat karena adanya perekonomian yang mengalami penurunan yang cukup besar dalam pendistribusian pendapatan, kemudian setelah tahap pembangunan berikutnya ketimpangan distribusi pendapatan cenderung menurun karena distribusi pendapatan sudah lebih merata. Dalam jangka pendek terdapat hubungan yang positif antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan ketimpangan pendapatan, namun kemudian dalam jangka Panjang hubungannya adalah negatif. Pembangunan antar daerah ini diakibatkan adanya sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografis yang berbeda di setiap daerah sehingga proses pembangunan di setiap daerah juga mengalami perbedaan yang kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pembangunan antar daerah (Hutabarat, 2014).

Pengaruh Tidak Langsung

1. Pengaruh tidak langsung Upah Minimum (X_1) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) melalui ketimpangan distribusi pendapatan (Y_1).

Untuk mengetahui Pengaruh tidak langsung upah minimum (X_1) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) melalui ketimpangan distribusi pendapatan (Y_1).dapat dihitung dengan rumus:

$$S_{\beta_1\beta_5} = \sqrt{\beta_5^2 S_{\beta_1^2} + \beta_1^2 S_{\beta_5^2}}$$

$$S_{\beta_1\beta_5} = \sqrt{(6,295)^2(0,000)^2 + (-5,335)^2 (22,550)^2}$$

$$S_{\beta_1\beta_5} = \sqrt{(0) + (28,462)(508,502)}$$

$$S_{\beta_1\beta_5} = \sqrt{(0) + (15.809,74)}$$

$$S_{\beta_1\beta_5} = \sqrt{14.472,98}$$

$$S_{\beta_1\beta_5} = 120,303$$

Berdasarkan perhitungan rumus $S_{\beta_1\beta_5}$ maka untuk menguji signifikansi variabel *intervening* harus menghitung nilai z dari koefisien $S_{\beta_1\beta_5}$ dengan rumus sebagai berikut:

$$Z = \frac{\beta_1\beta_5}{S_{\beta_1\beta_5}}$$

$$Z = \frac{(-5,335) (6,295)}{120,303}$$

$$Z = 0,279$$

Oleh karena nilai Z hitung sebesar $0,279 < 1,96$ artinya Upah Minimum (X_1) tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Besarnya pengaruh tidak langsung antara variabel Upah Minimum (X_1) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) melalui ketimpangan distribusi pendapatan (Y_1)dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 X_1 \longrightarrow Y_1 \longrightarrow Y_2 &= (a_1 \times b) \\
 &= (-5,335) (6,295) \\
 &= 33,583
 \end{aligned}$$

Nilai sebesar 47,879 mempunyai arti bahwa pengaruh tidak langsung antara variabel Upah Minimum (X_1) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) melalui ketimpangan distribusi pendapatan (Y_1) adalah sebesar 33,583 persen.

2. Pengaruh tidak langsung investasi (X_2) terhadap indeks pembangunan manusia (Y_2) melalui distribusi pendapatan (Y_1).

Pengaruh tidak langsung investasi (X_2) terhadap indeks pembangunan manusia (Y_2) melalui distribusi pendapatan (Y_1) dapat dihitung dengan rumus:

$$\begin{aligned}
 S_{\beta_2\beta_5} &= \sqrt{\beta_5^2 S_{\beta_2^2} + \beta_2^2 S_{\beta_5^2}} \\
 S_{\beta_1\beta_5} &= \sqrt{(6,295)^2 (0,000)^2 + (2,066)^2 (22,550)^2} \\
 S_{\beta_1\beta_5} &= \sqrt{(0) + (4,268)(508,502)} \\
 S_{\beta_1\beta_5} &= \sqrt{(0) + (2.170,286)} \\
 S_{\beta_1\beta_5} &= \sqrt{2.170,286} \\
 S_{\beta_2\beta_5} &= 46,586
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rumus $S_{\beta_2\beta_5}$ maka untuk menguji signifikansi variabel *intervening* harus menghitung nilai z dari koefisien $S_{\beta_2\beta_5}$ dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Z &= \frac{\beta_2\beta_5}{S_{\beta_2\beta_5}} \\
 Z &= \frac{(2,066) (6,295)}{46,586} \\
 Z &= 0,279
 \end{aligned}$$

Oleh karena Z hitung sebesar $0,279 < 1,96$ artinya investasi (X_2) tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Besarnya pengaruh tidak langsung antara variabel investasi (X_2) terhadap indeks pembangunan manusia (Y_2) melalui distribusi pendapatan (Y_1) dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned} X_2 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2 &= (a_2 \times b) \\ &= (2,066) (6,295) \\ &= 13,005 \end{aligned}$$

Nilai sebesar 19,478 mempunyai arti bahwa pengaruh tidak langsung investasi (X_2) terhadap indeks pembangunan manusia (Y_2) melalui distribusi pendapatan (Y_1) adalah sebesar 13,005 persen.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan. Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapat kabupaten/kota di Provinsi Bali, sedangkan Investasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Ketimpangan distribusi

pendapatan tidak berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Upah minimum (X_1) tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) melalui ketimpangan distribusi pendapatan (Y_1) kabupaten/kota di Provinsi Bali. investasi (X_2) tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) melalui ketimpangan distribusi pendapatan (Y_1) kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut. Melihat besarnya pengaruh upah minimum terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali, diharapkan pemerintah dapat memperhatikan tingkat upah yang ditetapkan pada setiap kabupaten/kota sehingga dapat meningkatkan rata-rata pertumbuhan indeks pembangunan manusia bagi kabupaten/kota di Provinsi Bali yang rata-rata pertumbuhan indeks pembangunan manusianya masih rendah. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat dihitung menggunakan indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali, perlu adanya program di bidang pendidikan dan upah untuk meningkatkan kesejahteraan yang terdapat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Investasi yang tinggi di kabupaten/kota Provinsi Bali belum menunjukkan hubungan yang positif terhadap kesempatan kerja. Hal ini dapat terjadi jika investasi yang ditanamkan di daerah-daerah cenderung investasi padat modal, dan investasi jangka panjang. Peningkatan investasi yang diperoleh

setiap daerah harus diimbangi dengan penciptaan kesempatan kerja di setiap daerah, atau investasi yang cenderung padat karya sehingga dapat menyerap tenaga kerja, dengan tujuan untuk mengurangi penduduk miskin dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga rekomendasi yang diberikan adalah (1) menaikkan tingkat upah minimum pada sektor pertanian dan jasa pada batas yang mampu menarik tenaga kerja pada sektor pertanian dan jasa, (2) menaikkan tingkat upah minimum pada daerah-daerah yang berbasis pada sektor pertanian.

REFRENSI

- Anggatia Ariza. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam Perspektif Islam.
- Amirul Zamharir. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, PDRB Perkapita, dan Upah Minimum Terhadap Human Development Index: Studi Kasus 12 Provinsi Dengan Kategori Lower Medium di Indonesia. *Skripsi*.
- Barro, RJ., Sala-i-Martin, Xavier. 2004. *Economic Growth : Second Edition*. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts. London, England
- Borgan Bonerri Kadek, 2018. *Pengaruh Pendidikan Dan Upah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Tpak) Di Kota Manado*
- Citrawan I Wayan, Widana I Wayan, & Suarta I Made. (2018). Education Sector Optimization for Improving Human Development Index. *International Journal of Social Sciences and Humanities*. Vol. 2 No. 1, Pages: 117~133 E-ISSN: 2550-7001, P-ISSN: 2550-701X.
- Dwi Setyadhi Mustika Made. 2013. *Analisis Disparitas Pendapatan Pedagang Makanan Gerobak Dorong Antar Kecamatan Di Kota Denpasar*. PIRAMIDA Vol. Ix No. 2 : 89 – 94
- Fleisher Belton, Haizheng Li, Dan Qiang Zhao. 2009. *Human Capital, Economic Growth, And Regional Inequality In China*, *Journal Of Development Economis, Departement Of Economics, Ohio State University, Columbus Oh 43210, United States*. No 17.

- Hariwan Peggy & Swaningrum Ayu. (2015). Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 8 No. 1: 72-82. ISSN: 2301-8968.
- Hutabarat, S. & Stewart M.E. (2014). *Pengantar Oseanografi*. Jakarta: UI-Press.
- Irawan Andi, 2015. *Regional Income Disparities In Indonesia: Measurements, Convergence Process, And Decentralisation*. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*. Issn: 0007-4918
- Kurniawan Septyono & Sulistyaningrum Eny. (2017). Dampak Serikat Buruh Terhadap Tingkat Upah Buruh Sektor Swasta di Indonesi. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 10 No. 2 ▪ Agustus 2017: 193-215 PISSN: 2301-8968 EISSN: 2303 – 0186.
- Musfidar Ma'mun. (2012). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Selatan Tahun 2001-2010". Sarjana (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Hasanuddin. Makasar. *Skripsi*.
- Nunnenkam Peter dan Herzer Dierk . (2011). Income Inequality and Health: Evidence from developed and developing Countries. *E-Jurnal Economis* Vol. 9 No. 4/ 4 Februari 2011.
- Novayanty. 2017. "Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (Pmdn) Dan Penanaman Modal Asing (Pma) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar". *Jurnal Riset Edisi XIV*. Vol 3, No. 003. Hal, 81.
- Oka Artana Yasa I Komang & Arka Sudarsana. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 8 No. 1: 63 – 71. ISSN: 2301-8968.
- Purbaya Ghofar, "Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Kasus Pengusaha Krupuk Dan Camilan Hasil Laut di Pantai Kenjeran Lama Surabaya", (OECONOMICUS Journal Of Economics), Volume 1, No. 1, Des 2016, h.76
- Simpem Arini Putu & Gede Bendesa I Komang. (2012). Pengaruh Hari Raya Galungan Pada Seasonal Adjusted IHK dan Penentuan Komoditas Utama Yang Mempengaruhi Inflasi di Provinsi Bali: Analisis Arima. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 5 No. 2: 79 – 86. ISSN: 2301-8968.
- Sudibia I Ketut Et Al, 2015, Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. Vol Xi. No 1, Hal 20-28.

Sukirno, S. 2012. *Pengantar Teori Makroekonomi Edisi ketiga*. Jakarta : Rajawali Pers.

Suciati, D. A.P., Budhi, M. K.S., dan Jayastra, K. 2015. Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan Dan Investasi Pada Kesejahteraan Masyarakat Melalui Belanja Langsung Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2007-2012. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. 20(2).h:83-93.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sofiyana Maharani Arizka. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Pulau Kalimantan*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Tambunan, Tulus TH. 2001. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Taufik, Muhammad; Rochaida, Eny; Fitriadi, Fitriadi. Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], nov. 2015.

Tunas Syilviarani Anis, 2017, Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa Tahun 2010-2015 Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

Todaro Michael P & Stephen C. Smith. (2004). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1*. Edisi Kesembilan, Jakarta: Erlangga.

Toth Russell, 2013. *The Dynamics of Entrepreneurial Human Capital*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. ISSN: 0007-4918

Utama Made Suyana. (2016). *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar: Cv. Sastra Utama.

Wildan Syafitri. (2013). Determinants of Labour Migration Decisions: The Case of East Java, Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 49:3, 385-386, DOI:10.1080/00074918.2013.850638.